



Judul : Dukungan Hak Angket Diyakini Bertambah
Tanggal : Kamis, 14 Maret 2024
Surat Kabar : Media Indonesia
Halaman : 1

Dukungan Hak Angket Diyakini Bertambah

Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja telah mendapatkan laporan modus rekayasa perolehan suara di tingkat kecamatan.

YAKUB PRYATAMA WIJAYATMAJA
yakub.p@mediaindonesia.com

ANGGOTA Fraksi PKB di DPR RI yang akan mendukung penggunaan hak angket dugaan kecurangan pemilu diperkirakan terus bertambah.

Ketua DPP PKB Luluk Nur Hamidah di Jakarta, kemarin, menjelaskan sekitar 7-10 anggota fraksi partainya di DPR sudah pasti mendukung penggunaan hak angket.

Luluk yakin hak angket bisa bergulir asalkan parpol pendukung Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD solid. "Dari kami (PKB) sudah siap saja dari sisi dukungan anggota. Tinggal fraksi lain,"

tandas Luluk.

Kesiapan Fraksi PKB memperkuat sikap Fraksi Partai NasDem seperti dinyatakan Taufik Basari, beberapa waktu lalu. Bahkan, saat ini NasDem sedang mempersiapkan tanda tangan dari seluruh anggota fraksi.

Di lain pihak, Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) PPP Sandiaga Uno membenarkan kalau Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum PPP Mardiono melarang kader partai berlabang Ka'bah itu berbicara soal hak angket. "Semua kader diminta menyerahkan keputusan akhir PPP kepada Plt Ketua Umum," papar Sandiaga.

Di sisi lain, calon presiden Anies Baswedan mengaku menunggu hasil resmi rekapitulasi suara oleh Komisi Pe-

milihan Umum (KPU). Namun, Anies mengingatkan, persoalan pemilu bukan sekadar penghitungan. "Tapi juga kegiatan pra-penghitungan dan pra-pemilu sehingga kita tahu bahwa hasil pemilu sesuai dengan aspirasi rakyat sesungguhnya, bukan hasil tekanan atau tawaran imbalan," ujar Anies.

Peneliti senior Pusat Riset Politik, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Lili Romli menilai, meningkatnya dukungan menjadi penanda hak angket akan bergulir. "Saya kira itu angin segar di tengah kabar penggunaan hak angket yang kelihatannya maju mundur," tutur Lili.

Dengan bertambahnya dukungan tersebut, kata Lili, seharusnya dapat menjadi spirit bagi anggota dewan lain untuk segera mengulirkan hak angket.

Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Rahmat Bagja mengaku telah mendapatkan la-

poran dugaan modus rekayasa perolehan suara di tingkat kecamatan sehingga formulir Model D hasil suara di tingkat kecamatan berbeda dengan formulir Model C1 di tingkat tempat pemungutan suara (TPS) yang diunggah ke Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) KPU. "Ini masih dugaan. Padahal unggahan formulir C di Sirekap tidak hermasalah."

Karena itu, dia mempertanyakan langkah KPU yang beberapa kali menghentikan tampilan Sirekap. "Jangan sampai ada pergeseran suara di tingkat kecamatan, kemudian ditutupi di tingkat provinsi dan nasional," kata Bagja.

Sebelumnya, mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menjadi calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI dari Provinsi Jawa Timur, Agus Rahardjo, melaporkan pergeseran perolehan suara di tingkat kecamatan, yang

membuat perolehan suara di formulir D berbeda dengan C1. "Misalkan, di C1 ada 13 calon anggota legislatif (caleg) dan dapat (suara) semua, di formulir D hanya tiga orang yang dapat," katanya.

Tolak teken

Sementara itu, KPU mengesahkan kemenangan pasangan calon nomor urut 2 Prahowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka di Jawa Timur. Akan tetapi, perolehan suara berdasarkan penghitungan manual itu ternyata diwarnai penolakan oleh saksi dari pasangan 01 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan pasangan 03 Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

Ketua KPU Jawa Timur Aang Kunaifi saat rekapitulasi nasional di Jakarta mengungkap saksi kedua pasangan calon itu menolak meneken berita acara penghitungan suara lantaran sejumlah kejanggalaan.

Aang menyebut kejanggalaan itu antara lain persoalan input data perolehan suara mulai dari tingkat TPS hingga kabupaten/kota. "Lalu, dugaan kecurangan pengelembungan suara, *money politics*, serta tingginya intimidasi terhadap saksi di TPS," terang Aang. (Tri/Teo/Mal/X-7)